

**APAKAH DANA DESA BENAR-BENAR BEKERJA?
BUKTI KUANTITATIF DAMPAKNYA TERHADAP PEMERATAAN
PEMBANGUNAN, KEMISKINAN, KUALITAS PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KINERJA EKONOMI DAERAH DI PROVINSI NTB**

Subhan Purwadinata¹, Adi Widyandana², Indra Wahyudi², Shibghotullah Syubbanur Robbani², Maryanto², Moh. Almuwafiqi Imaduddin².

¹Universitas Mataram,

²Kantor Wilayah DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat

Korespondensi: subhan_purwadinata@staff.unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Desa terhadap pemerataan pembangunan, tingkat kemiskinan, kualitas pembangunan manusia, ketimpangan pendapatan, stunting, dan kinerja ekonomi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisis regresi data panel menggunakan software STATA 19. Data yang digunakan data sekunder berupa data panel Kabupaten/kota dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan [Spanint.kemenkeu.go.id/tkd/](http://spanint.kemenkeu.go.id/tkd/) periode 2018–2025. Metode analisis statistik kuantitatif asosiatif pendekatan Multiple Regression Analysis dengan menganalisis pengaruh Dana Desa terhadap variabel proksi dari pemerataan pembangunan, kualitas pembangunan manusia dan perkembangan ekonomi daerah Provinsi NTB yaitu variabel kemiskinan, pendapatan per kapita, gini rasio, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), persentase balita stunting, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa lebih berperan sebagai instrumen pengurangan kemiskinan, pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah dibandingkan sebagai pendorong utama peningkatan kualitas pembangunan manusia. Terbukti dari pengaruh positif dan signifikan dana desa terhadap tingkat kemiskinan, gini rasio dan PDRB. Dana desa tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pendapatan per kapita, IPM, persentase balita stunting pada taraf kepercayaan α 5 %. Temuan ini mempertegas bahwa Dana Desa berkontribusi penting dalam mendukung pengurangan kemiskinan, pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, namun efektivitasnya terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia masih perlu dioptimalkan minimal dengan melakukan penguatan tata kelola.

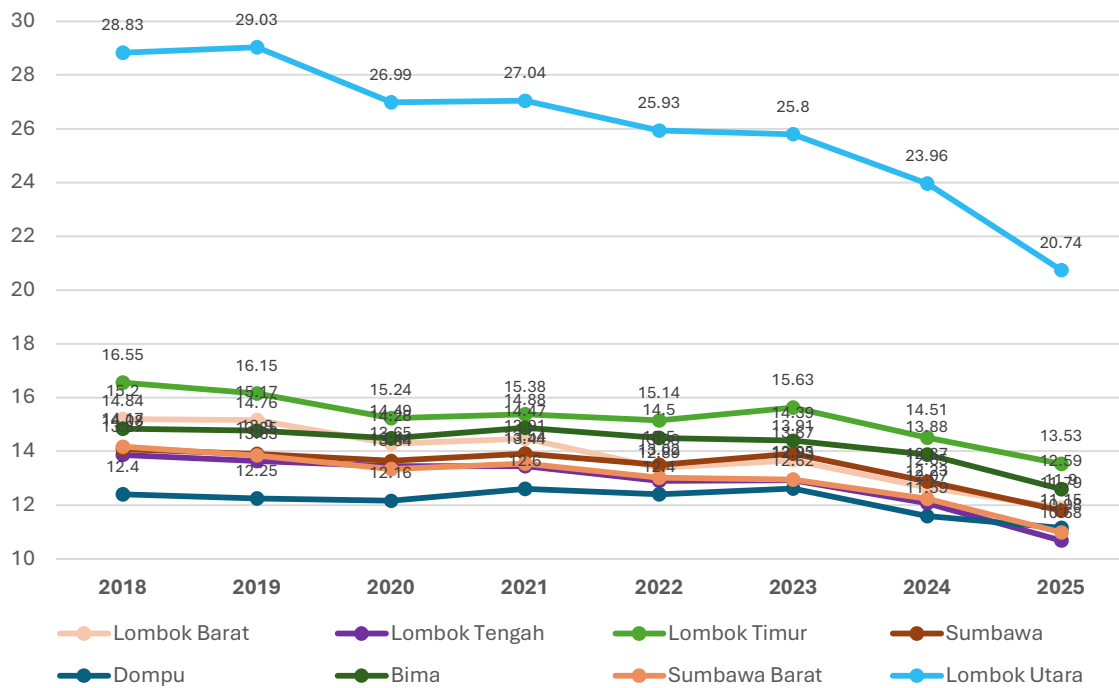
Kata Kunci: Dana Desa, Kemiskinan, Pemerataan Pembangunan, IPM, Stunting, PDRB, NTB.

1. LATAR BELAKANG

Sejak digulirkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, komitmen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menggeser poros pembangunan ke tingkat tapak menjadi instrumen fiskal yang revolusioner. Dekonsentrasi pembangunan yang diwujudkan melalui kebijakan Dana Desa menandai babak baru dalam arsitektur fiskal nasional, di mana desa tidak lagi menempatkan diri sebagai objek melainkan subjek utama penggerak ekonomi. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebuah wilayah dengan karakteristik kepulauan yang kaya akan potensi agraris, pariwisata, sekaligus memiliki ketergantungan tinggi pada sektor komoditas *volatile*, Dana Desa hadir sebagai instrumen krusial untuk mengintervensi persoalan struktural daerah. Kendati demikian, di tengah masifnya realisasi transfer dana pusat ke daerah tersebut, NTB masih dihadapkan pada fluktuasi PDRB non-tambang yang dinamis, tantangan akselerasi IPM, serta disparitas pembangunan antarwilayah yang persisten. Fenomena ini memicu pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana efektivitas ekspansi fiskal tingkat desa mampu mentransformasi indikator-indikator kesejahteraan makro tersebut secara inklusif dan merata.

Pembangunan pedesaan merupakan salah satu pilar utama dalam agenda pembangunan nasional. Desa tidak lagi diposisikan semata sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan hingga kini masih menjadi tantangan serius, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Perbedaan akses terhadap infrastruktur dasar, layanan publik, serta peluang ekonomi menyebabkan sebagian desa tertinggal di beberapa sektor dibandingkan kawasan perkotaan maupun wilayah lain yang lebih maju. Penduduk desa sebagian masih ada yang berada di bawah garis kemiskinan, grafik di bawah ini bisa menjadi gambaran kondisi penduduk miskin yang ada di Provinsi NTB.

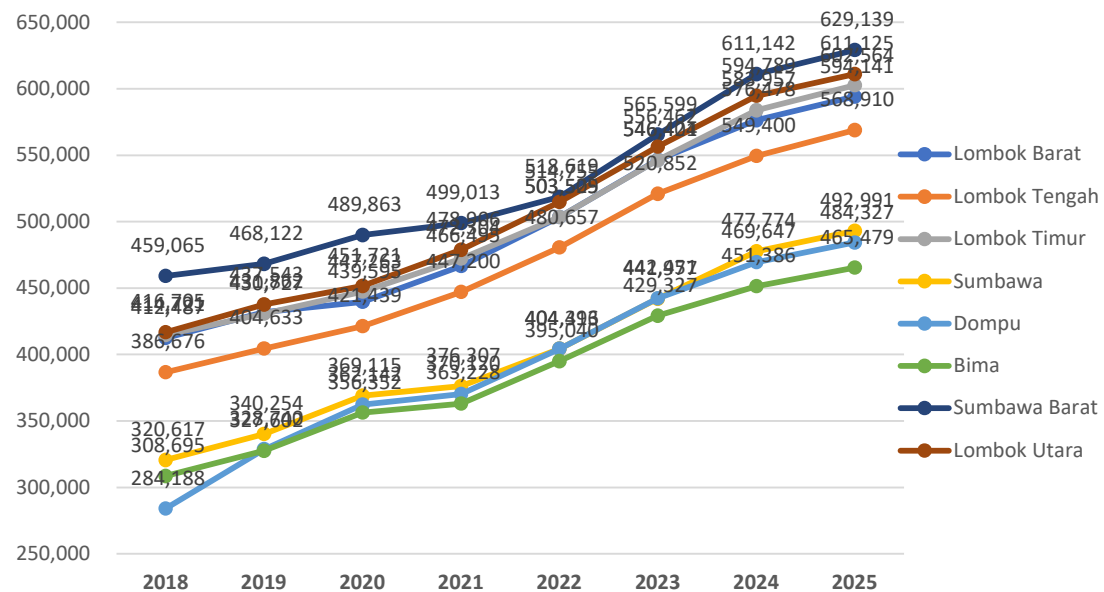
Gambar 1. Tren Persentase Penduduk Miskin per Kabupaten di Provinsi NTB



Sumber: ntb.bps.go.id

Selain itu, kondisi lain yang dapat menggambarkan kondisi kemiskinan penduduk pedesaan, dapat dilihat melalui grafik tren garis kemiskinan seperti berikut :

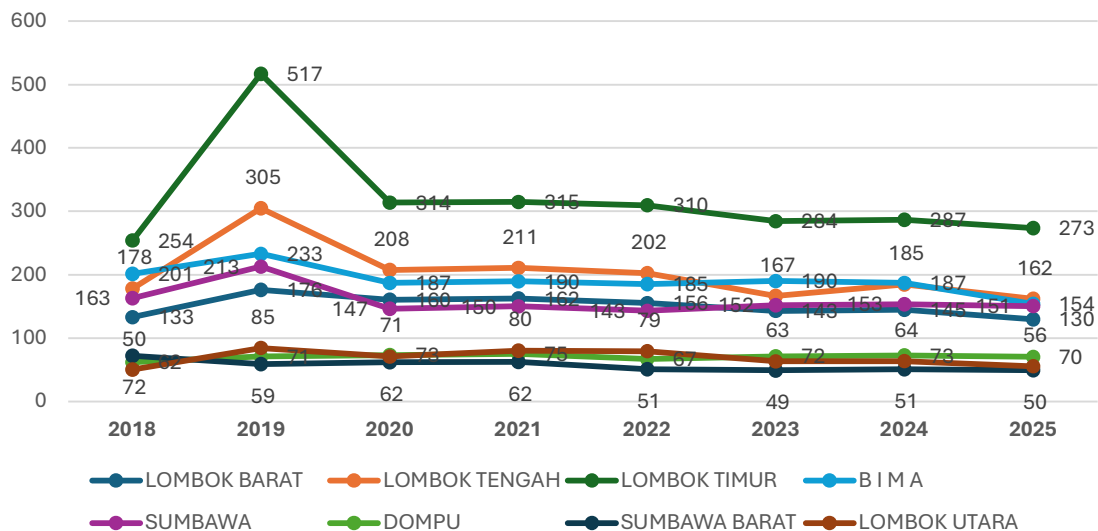
Gambar 2. Tren Garis Kemiskinan per Kabupaten Berdasarkan Pendapatan/Kapita/Bulan di Provinsi NTB



Sumber: ntb.bps.go.id

Sejak diimplementasikannya kebijakan Dana Desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah secara konsisten menyalurkan dana secara langsung ke tingkat desa sebagai bagian dari strategi desentralisasi pembangunan. Kebijakan ini dirancang untuk mempercepat pemerataan pembangunan, menekan angka kemiskinan, serta memperkuat basis ekonomi desa. Dalam perkembangannya, Dana Desa telah menjadi salah satu kebijakan transfer fiskal terbesar di Indonesia, dengan nilai alokasi anggaran yang nominalnya cukup besar. Alokasi dana yang dikururkan tersebut secara logis menuntut adanya evaluasi empiris yang serius terkait sejauh mana Dana Desa mampu mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat desa secara nyata. Data berikut bisa menjadi gambaran tren penyaluran Dana Desa di Provinsi NTB.

Gambar 3. Tren Penyaluran Dana Desa per Kabupaten (dalam miliar Rp) di Provinsi NTB



Sumber: spanint.kemenkeu.go.id/tkd/

Provinsi NTB menjadi konteks wilayah yang penting dan relevan untuk mengkaji efektivitas kontribusi Dana Desa. Provinsi ini memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama pada sektor pertanian yang menopang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) penduduk Provinsi NTB yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Namun, potensi tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural seperti tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, ketimpangan pembangunan antar desa, serta lemahnya kinerja ekonomi lokal di sejumlah wilayah. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai kontribusi Dana Desa, apakah kebijakan tersebut benar-

benar berfungsi sebagai pengungkit kesejahteraan desa di NTB, atau justru belum memberikan dampak yang optimal sebagaimana tujuan awal perumusannya.

Selama ini, kajian dan diskusi mengenai Dana Desa cenderung didominasi oleh pendekatan normatif dan deskriptif yang lebih menekankan pada aspek tata kelola, penyerapan anggaran, serta laporan administratif keberhasilan program. Keberhasilan suatu kebijakan publik tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang disalurkan atau tingkat realisasi belanja, melainkan dari dampak terukur yang dihasilkan terhadap indikator kesejahteraan masyarakat. Minimnya penelitian empiris berbasis pendekatan kuantitatif yang komprehensif berpotensi menimbulkan bias kebijakan, dimana efektivitas kontribusi Dana Desa diasumsikan tercapai tanpa dukungan bukti statistik yang kuat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk menghadirkan bukti kuantitatif mengenai pengaruh Dana Desa terhadap tiga aspek utama kesejahteraan desa, yakni tingkat kemiskinan, pemerataan pembangunan, dan kinerja ekonomi desa di Provinsi NTB. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk memungkinkan pengujian hubungan secara objektif dan terukur sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai efektivitas Dana Desa sebagai instrumen pembangunan desa.

Secara normatif, dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Desa merupakan salah satu dari jenis transfer ke daerah oleh Pemerintah Pusat yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Melalui kewenangan fiskal yang lebih besar, pemerintah desa diharapkan mampu merespon kebutuhan masyarakat secara lebih tepat sasaran dan kontekstual. Namun dalam praktiknya, efektivitas Dana Desa dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut masih perlu dikaji kembali.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian ekonomi pembangunan dan kebijakan publik sekaligus menjadi dasar pertimbangan bagi perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*). Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan antara tujuan normatif Dana Desa dan realitas empiris di tingkat desa, serta memberikan jawaban atas pertanyaan fundamental tentang sejauh mana Dana Desa benar-benar berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Provinsi NTB.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan manfaat berupa gambaran mengenai sejauh mana Dana Desa yang telah dialokasikan berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan, perkembangan ekonomi, peningkatan kualitas pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan di wilayah Provinsi NTB.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Ketentuan mengenai Dana Desa diatur oleh pemerintah dengan berbagai macam lapisan mulai dari tingkat undang-undang sampai peraturan teknis tahunan. Secara umum, regulasi utamanya dapat dibagi menjadi beberapa kelompok aturan. Dasar hukum utama Dana Desa ditetapkan melalui undang-undang, kemudian sumber dana, formula alokasi, mekanisme penyaluran, prioritas penggunaan, serta monitoring dan evaluasi diatur oleh Peraturan Pemerintah. Sedangkan regulasi teknis seperti persyaratan penyaluran, besaran alokasi Dana Desa diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang kebijakannya menyesuaikan kondisi di tahun berkenaan. Sedangkan mengenai prioritas penggunaan Dana Desa seperti ketahanan pangan, penanggulangan *stunting*, pengentasan kemiskinan, serta infrastruktur dasar desa, diatur oleh Peraturan Menteri Desa. Selain itu, dari sisi perspektif Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), Dana Desa dapat dipandang sebagai instrumen desentralisasi fiskal yang memperkuat peran pemerintah lokal dalam menyediakan barang dan jasa publik.

Dana Desa dalam kaitannya dengan pemerataan pembangunan, kita perlu melihat konsep dari Todaro, M. P., & Smith, S. C. yang menyatakan bahwa pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi nasional, serta percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan penghapusan kemiskinan. Pada hakikatnya, pembangunan harus merepresentasikan keseluruhan spektrum perubahan yang melalui suatu sistem sosial secara menyeluruh.

Teori Arthur Lewis sebagai bagian dari mazhab teori pembangunan klasik dengan model ekonomi yang terkenal *Dual Sector Model* (Lewis Model) mengeksplorasi pembangunan ekonomi baik di pedesaan maupun perkotaan yang diperkuat oleh teori Rostow bahwa

pembangunan ekonomi merupakan transisi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Dana Desa merupakan transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada desa yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas desa dalam membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Literatur dan Tinjauan Pustaka

Berkaitan proses pemerataan pembangunan, Rifa'at, et al (2019) menyatakan kesenjangan wilayah merupakan hal yang wajar dalam sebuah pembangunan. Masalah pokok yang harus dipecahkan adalah adanya konsepsi kuat untuk jangka waktu panjang dan dilandasi keadilan sosial, serta adanya sistem ekonomi politik negara yang tidak memihak terlalu kuat pada wilayah tertentu. Pemerataan pembangunan merujuk pada upaya mengurangi ketimpangan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat. Infrastruktur dasar, akses layanan publik, dan kualitas hidup merupakan indikator utama pemerataan pembangunan. Dana Desa berpotensi mendorong pemerataan melalui pembangunan infrastruktur skala desa yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Hal ini merupakan instrumen penting mengurangi ketimpangan pembangunan desa dengan kota. Melalui Dana Desa, pemerintah desa dapat membangun infrastruktur dasar seperti jalan desa, jembatan. Irigasi, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya.

Dalam penelitiannya, Ngurah Gede, A. A. & Iskandar (2023), menyimpulkan bahwa pemberian Dana Desa memiliki dampak positif yang signifikan terhadap capaian pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu wilayah. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian tersebut dengan teknik analisis *Difference in Difference* (DID) membandingkan kondisi sebelum adanya Dana Desa di tahun 2014 dengan sesudah adanya implementasi Dana Desa pada tahun 2019. Pemberian Dana Desa terbukti secara empiris mampu mengakselerasi secara positif capaian pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur ekonomi mengalami peningkatan paling signifikan diantaranya pembangunan jalan desa, jembatan, irigasi, pasar desa, dan sarana air bersih. Selain hal itu, terjadi lonjakan jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari 1.022 unit pada tahun 2014 menjadi 50.199 unit pada tahun 2019.

Kerangka Konseptual

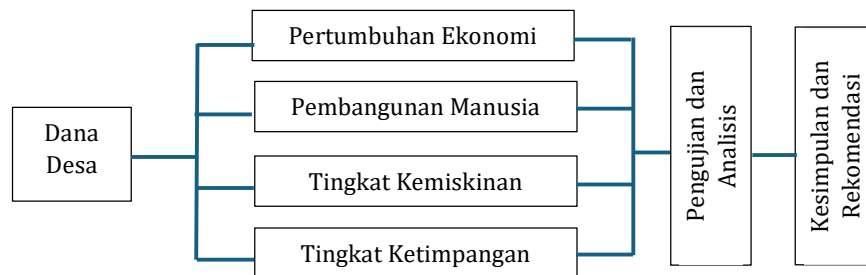
Secara umum, konsep penelitian ini memposisikan Dana Desa sebagai salah instrumen kebijakan fiskal yang kemudian dianalisis pengaruhnya terhadap beberapa variabel

perekonomian dan pembangunan daerah pada Provinsi NTB. Beberapa variabel yang dimaksud antara lain :

1. Pertumbuhan Ekonomi : proses kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara kesinambungan dalam wilayah dan periode tertentu dan diukur melalui peningkatan PDRB.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : indikator komposit yang mengukur pencapaian rata-rata kualitas hidup manusia berdasarkan tiga dimensi dasar : umur panjang/sehat (kesehatan), pengetahuan (pendidikan), dan standar hidup layak (ekonomi)
3. Tingkat Kemiskinan : persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
4. Gini Rasio : indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan atau pengeluaran penduduk secara menyeluruh, dengan skala 0 hingga 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna.

Variabel-variabel di atas digunakan untuk menilai pengaruh Dana Desa di Provinsi NTB dengan metode analisis yang dijabarkan di bab berikutnya. Hasil akhirnya berupa Kesimpulan dan rekomendasi kebijakan strategis yang dituangkan pada bab paling akhir.

Gambar 4 Kerangka Konseptual Penelitian



Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan tinjauan pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini dibagi menjadi dua : hipotesis utama dan hipotesis parsial.

1. Hipotesis utama :

H₁ : Dana Desa memiliki pengaruh signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan, pemerataan Pembangunan, pertumbuhan ekonomi daerah dan kualitas pembangunan manusia, dan stunting di Provinsi NTB.

2. Hipotesis parsial :

H_{1a} : Dana Desa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi NTB

H_{1b} : Dana Desa berpengaruh positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi NTB

H_{1c} : Dana Desa berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi NTB

H_{1d} : Dana Desa berpengaruh negatif terhadap tingkat ketimpangan (gini rasio) di Provinsi NTB

H_{1e} : Dana Desa berpengaruh negatif terhadap tingkat *stunting* di Provinsi NTB

Hipotesis ini akan diuji menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data panel untuk melihat pengaruh antara Dana Desa sebagai variabel independen dengan indikator-indikator kesejahteraan sebagai variabel dependen.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan tujuan mengukur dan menganalisis pengaruh Dana Desa terhadap pemerataan pembangunan, kemiskinan, dan kualitas pembangunan manusia maupun pembangunan ekonomi daerah di Provinsi NTB. Konsep dan teori mengenai pemerataan pembangunan, capaian dan pertumbuhan ekonomi, disintesis terlebih dahulu untuk kemudian diperoleh hipotesis spesifik sebagaimana ditunjukkan di bagian penentuan hipotesis yang akan diuji menggunakan data panel kabupaten di Provinsi NTB.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari lembaga yang kredibel. Sebagian besar data diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS) seperti data tingkat kemiskinan, pendapatan perkapita penduduk per bulan, gini rasio, IPM, dan PDRB di Provinsi NTB. Sedangkan data penyaluran Dana Desa ke Rekening Kas Desa diperoleh melalui Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN). Rentang waktu data panel yang digunakan mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Dokumen-dokumen terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Laporan Pemantauan Transfer ke Daerah oleh Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTB dijadikan sumber informasi untuk lebih memperluas wawasan dan konteks. Kemudian peraturan perundang-undangan terkait Dana Desa serta kajian maupun literatur ilmiah digunakan untuk memperkuat landasan teoritis dan empiris.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, dan pemerintah daerah di Provinsi NTB. Data mencakup Dana Desa, tingkat kemiskinan, pendapatan perkapita penduduk perbulan, gini rasio, IPM, persentase balita stunting dan variabel ekonomi lokal yang diproksikan menggunakan data PDRB per Kabupaten di Provinsi NTB. Rentang waktu data yang digunakan mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Definisi Operasional Variabel

Variabel independen utama dalam penelitian ini adalah Dana Desa, yaitu total alokasi dana transfer pusat yang masuk ke rekening kas desa di tiap kabupaten. Variabel dependen mencakup tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin), IPM, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Variabel, jenis variabel, indikator pengukuran, skala dan sumber data disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

N o	Variabel	Jenis Variabel	Definisi Operasional	Indikator/ Pengukuran	Skala
1	Dana Desa	Independen (X)	Dana transfer dari pemerintah pusat kepada desa yang disalurkan melalui APBN untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di NTB	Total realisasi penyaluran Dana Desa per kabupaten/kota di Provinsi NTB (Rp/miliar)	Rasio
2	Tingkat Kemiskinan	Dependen (Y1)	Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan berdasarkan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di NTB	Persentase penduduk miskin (%)	Rasio
3	Indeks Pembangunan	Dependen (Y2)	Indikator komposit yang menggambarkan kualitas hidup masyarakat dari	Nilai IPM Kabupaten/ Kota NTB	Rasio

N o	Variabel	Jenis Variabel	Definisi Operasional	Indikator/ Pengukuran	Skala
	Manusia (IPM)		aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak di NTB		
4	Pertumbuhan Ekonomi / PDRB	Dependen (Y3)	Perkembangan aktivitas ekonomi daerah yang diukur melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto di NTB	Nilai PDRB atas dasar harga berlaku/ per kabupaten/kota di NTB	Rasio
5	Gini Rasio	Dependen (Y4)	Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat NTB	Nilai gini rasio (0–1) NTB	Rasio
6	Persentase Balita Stunting	Dependen (Y5)	Persentase balita yang mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis berdasarkan tinggi badan menurut umur (TB/U) di NTB	Persentase balita stunting (%) NTB	Rasio

Metode Analisis/Pengujian Data

Analisis data dilakukan melalui analisis regresi data panel menggunakan tools analisis statistik Software STATA 19 untuk menggambarkan perkembangan Dana Desa dan indikator penelitian, serta analisis regresi linier untuk menguji pengaruh Dana Desa terhadap variabel dependen tingkat kemiskinan, pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi daerah dan kualitas pembangunan manusia daerah di NTB.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis regresi, variabel dana desa menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa distribusi Dana Desa telah menjadi menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat di NTB sebagaimana ditunjukkan dalam analisis statistik berikut :

Gambar 5. Hasil Analisis Regresi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	64
Model	3495.51122	1	3495.51122	F(1, 62)	=	11.81
Residual	18344.4888	62	295.878851	Prob > F	=	0.0011
				R-squared	=	0.1601
				Adj R-squared	=	0.1465
Total	21840	63	346.666667	Root MSE	=	17.201

danadesa	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
persentasekemiskinan	1.683253	.4897237	3.44	0.001	.7043097	2.662197
_cons	7.058678	7.707836	0.92	0.363	-8.349067	22.46642

Sumber : Data Sekunder diolah

Berdasarkan hasil olah data menggunakan *software* STATA 19 menunjukkan Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Jika ditinjau dari perspektif kebijakan, hal ini telah sesuai dengan orientasi pemerintah bahwa dengan memprioritaskan distribusi dana desa pada daerah dengan tingkat kesejahteraan rendah sekaligus mempertimbangkan tingkat kemiskinan sebagai indikator utama distribusi anggaran tersebut guna mengurangi tingkat kemiskinan antar daerah. Sesuai hasil statistik terdapat hubungan positif dan signifikan antara dana desa dengan tingkat kemiskinan bahwa :

a. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Berdasarkan hasil estimasi nilai t hitung variabel tingkat kemiskinan = 3,44 dan nilai probabilitas (p-value) = 0,001 jika dibandingkan dengan tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$), maka: p-value (0,001) < 0,05. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa secara statistik, variabel dana desa berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pada alokasi dana desa secara nyata diikuti oleh perubahan pada persentase tingkat kemiskinan.

Koefisien yang bernilai positif mengindikasikan adanya hubungan searah, sehingga peningkatan persentase dana desa cenderung diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan. Secara konseptual, hal ini sejalan dengan kebijakan fiskal pemerintah yang menjadikan tingkat kemiskinan sebagai salah satu dasar dalam penyaluran dana desa. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa dana desa berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan diterima.

b. Uji F (Simultan)

Uji F menguji model regresi secara keseluruhan layak digunakan dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Berdasarkan hasil regresi diperoleh

nilai F hitung = 11,81 dan Prob F = 0,001. Jika dibandingkan dengan $\alpha = 0,05$ maka $0,001 < 0,05$, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa model regresi yang digunakan terbukti signifikan secara simultan. Artinya, variabel independen dalam model (dalam hal ini dana desa) secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen, yaitu tingkat kemiskinan. Dengan demikian, model regresi yang dibangun layak digunakan (*goodness of fit terpenuhi*) dan memiliki kemampuan untuk menjelaskan hubungan antar variabel secara statistik.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dana desa dalam menjelaskan variasi variabel dependen tingkat kemiskinan. Dari hasil estimasi diperoleh R^2 (R-squared) = 0,1601 (16,01%) dan Adjusted R-squared = 0,1465 (14,65%), hal ini dapat diinterpretasikan bahwa nilai R^2 sebesar tersebut menunjukkan bahwa variabel dana desa mampu menjelaskan 16,01% variasi tingkat kemiskinan, sedangkan sisanya sebesar 83,99% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nilai Adjusted R^2 yang sedikit lebih rendah mengindikasikan adanya penyesuaian terhadap jumlah variabel dalam model, dan memperkuat bahwa kemampuan penjelasan model masih relatif terbatas. Secara substantif, hal ini menunjukkan bahwa dana desa bukan satu-satunya variabel yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti jumlah penduduk, luas wilayah, indeks pembangunan desa, serta kebijakan alokasi fiskal pemerintah dan lain sebagainya dengan asumsi variabel lainnya *ceteris paribus*.

Dana Desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2018–2025. Nilai koefisien regresi untuk variabel Dana Desa adalah sebesar 1,683, mengindikasikan setiap penambahan alokasi Dana Desa sebesar 1 Miliar rupiah, diproyeksikan akan meningkatkan alokasi dana pada daerah tingkat kemiskinan tinggi sebesar 1,68 persen dengan asumsi variabel lain (*ceteris paribus*). Koefisien ini menunjukkan hubungan positif terjadi *reverse causality* (penyebab paling umum) yaitu Dana Desa justru lebih besar dialokasikan ke daerah yang lebih miskin.

2. Dana Desa Terhadap Pendapatan Kapita Perbulan

Penelitian ini menguji pengaruh alokasi Dana Desa terhadap pendapatan per kapita per bulan pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi NTB. Dianalisis melalui uji regresi, uji t, uji F, serta koefisien determinasi guna melihat signifikansi pengaruh Dana Desa terhadap pendapatan kapita perbulan masyarakat NTB, sebagaimana hasil analisis statistik berikut:

Gambar 6. Hasil Analisis Regresi Dana Desa Terhadap Pendapatan Kapita Perbulan

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	64
Model	6.94548909	1	6.94548909	F(1, 62)	=	0.02
Residual	21833.0545	62	352.14604	Prob > F	=	0.8888
				R-squared	=	0.0003
				Adj R-squared	=	-0.0158
Total	21840	63	346.666667	Root MSE	=	18.766

	danadesa	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]
pendapatankapitaperbulan		3.97e-06	.0000283	0.14	0.889	-.0000525 .0000605
_cons		30.66907	13.24645	2.32	0.024	4.189795 57.14835

Sumber : Data Sekunder diolah

a. Uji t (Parsial)

Berdasarkan hasil estimasi regresi, variabel pendapatan per kapita per bulan memiliki nilai t hitung sebesar 0,14 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,889. Nilai signifikansi tersebut jauh lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan ($\alpha = 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara parsial, variabel dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan per kapita per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pada dana desa tidak mampu menjelaskan variasi perubahan pendapatan per kapita masyarakat secara statistik. Dengan kata lain, tinggi atau rendahnya dana desa tidak menjadi faktor penentu dalam perubahan pendapatan per kapita pada model yang digunakan.

b. Uji F (Simultan)

Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 0,02 dengan probabilitas (Prob > F) sebesar 0,8888. Nilai probabilitas ini lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Oleh karena itu, model regresi yang digunakan tidak signifikan, sehingga variabel independen dana desa dalam model tidak mampu menjelaskan variabel dependen pendapatan per kapita per bulan secara bersama-sama. Temuan ini mengindikasikan bahwa model yang dibangun belum mampu menjelaskan hubungan antara dana desa dengan pendapatan per kapita per bulan.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh sebesar 0,0003 atau 0,03%, hal ini berarti variabel dana desa hanya mampu menjelaskan sebesar 0,03% variasi dalam pendapatan per kapita, sedangkan sisanya sebesar 99,97% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Nilai R^2 yang sangat kecil ini menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variabel

dependen sangat lemah (*low explanatory power*), sehingga model memiliki keterbatasan dalam memberikan penjelasan empiris yang kuat.

3. Dana Desa Terhadap Gini Rasio

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh alokasi Dana Desa terhadap gini rasio pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi NTB menunjukkan pengaruh yang signifikan. Analisis dilakukan dengan alasan untuk mengetahui sejauh mana tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di NTB berdasarkan jumlah alokasi dana desa yang tersedia. Hasil pengujian kemudian dianalisis melalui uji regresi, uji t, uji F, dan koefisien determinasi guna melihat arah pengaruh, tingkat signifikansi, serta kemampuan model dalam menjelaskan variasi Dana Desa terhadap gini rasio dengan analisis statistik sebagai berikut :

Gambar 7. Hasil Analisis Regresi Dana Desa Terhadap Gini Rasio

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	64
Model	3277.66709	1	3277.66709	F(1, 62)	=	10.95
Residual	18562.3329	62	299.392466	Prob > F	=	0.0016
				R-squared	=	0.1501
				Adj R-squared	=	0.1364
Total	21840	63	346.666667	Root MSE	=	17.303

danadesa	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
ginirasio	-194.3358	58.73415	-3.31	0.002	-311.7437	-76.92785
_cons	99.7341	20.43496	4.88	0.000	58.88518	140.583

Sumber : Data Sekunder diolah

a. Uji t (Parsial)

Berdasarkan hasil estimasi, variabel gini rasio memiliki nilai t hitung sebesar -3,31 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002. Nilai signifikansi P-Value 0,002 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara parsial, variabel dana desa berpengaruh signifikan terhadap gini rasio. Selain itu, tanda koefisien yang bernilai negatif (-194,3358) menunjukkan arah hubungan yang berlawanan, sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi dana desa maka dana desa cenderung mampu menurunkan ketimpangan pendapatan (gini rasio) dan sebaliknya.

b. Uji F (Simultan)

Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 10,95 dengan probabilitas (Prob > F) sebesar 0,0016. Nilai ini lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa secara simultan, model regresi signifikan, sehingga variabel independen mampu menjelaskan

variabel dependen secara bersama-sama. Meskipun hanya terdapat satu variabel independen, hasil ini menegaskan bahwa model yang dibangun layak digunakan secara statistik.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,1501 atau 15,01%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dana desa mampu menjelaskan sebesar 15,01% variasi gini rasio, sedangkan sisanya sebesar 84,99% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nilai ini mengindikasikan bahwa model memiliki daya jelas yang masih terbatas (moderat ke rendah), namun sudah jauh lebih baik dibandingkan model sebelumnya.

4. Dana Desa Terhadap IPM

Berdasarkan hasil penelitian ini pengaruh alokasi Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tingkat kabupaten/kota menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Analisis dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan manusia, yang mencerminkan aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat, memiliki keterkaitan dengan distribusi Dana Desa. Hasil pengujian kemudian dianalisis melalui uji regresi, uji t, uji F, dan koefisien determinasi guna melihat arah pengaruh, tingkat signifikansi, serta kemampuan model dalam menjelaskan variasi Dana Desa.

Gambar 8. Hasil Analisis Regresi Dana Desa Terhadap IPM

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	64
Model	419.128854	1	419.128854	F(1, 62)	=	1.21
Residual	21420.8711	62	345.497922	Prob > F	=	0.2750
				R-squared	=	0.0192
				Adj R-squared	=	0.0034
Total	21840	63	346.666667	Root MSE	=	18.588

danadesa	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
ipm	-.8615086	.7821833	-1.10	0.275	-2.425071	.7020536
_cons	92.09768	54.15996	1.70	0.094	-16.16653	200.3619

Sumber : Data Sekunder diolah

a. Uji t (Parsial)

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel IPM memiliki nilai t hitung sebesar -1,10 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,275. Nilai ini lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara parsial, **variabel dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM**. Meskipun koefisien regresi bernilai negatif (-0,8615), yang secara teoritis

menunjukkan hubungan berlawanan arah, namun karena tidak signifikan, maka perubahan dana desa tidak memiliki pengaruh yang berarti secara statistik terhadap IPM dalam model.

b. Uji F (Simultan)

Nilai F hitung sebesar 1,21 dengan probabilitas (Prob > F) sebesar 0,2750. Nilai ini lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa secara simultan, model regresi tidak signifikan, sehingga variabel independen dana desa tidak mampu menjelaskan variabel dependen IPM secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa model dengan variabel dana desa belum mampu menjelaskan variasi IPM.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 sebesar 0,0192 atau 1,92%. Artinya variabel dana desa hanya mampu menjelaskan sebesar 1,92% variasi IPM, sedangkan sisanya sebesar 98,08% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nilai ini menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan hubungan antar variabel masih sangat rendah.

5. Dana Desa Terhadap Persentase Balita Stunting

Berdasarkan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengaruh alokasi Dana Desa terhadap persentase balita stunting terhadap pada tingkat kabupaten/kota belum menunjukkan pengaruh yang signifikan. Analisis dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kondisi kesehatan masyarakat, khususnya masalah stunting, memiliki keterkaitan dengan distribusi Dana Desa. Hasil pengujian kemudian dianalisis melalui uji regresi, uji t, uji F, dan koefisien determinasi guna melihat arah pengaruh, tingkat signifikansi, serta kemampuan model dalam menjelaskan persentase balita stunting.

Gambar 9. Hasil Analisis Regresi Dana Desa Terhadap Balita Stunting

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	64
Model	1301.10146	1	1301.10146	F(1, 62)	=	3.93
Residual	20538.8985	62	331.272557	Prob > F	=	0.0519
				R-squared	=	0.0596
				Adj R-squared	=	0.0444
Total	21840	63	346.666667	Root MSE	=	18.201

	danadesa	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
persentasebalitastuntingtibu		.6715744	.3388685	1.98	0.052	-.0058142	1.348963
_cons		21.76971	5.872957	3.71	0.000	10.02984	33.50958

Sumber : Data Sekunder diolah

a. Uji t (Parsial)

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel persentase balita stunting (TB/U) memiliki nilai t hitung sebesar 1,98 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,052. Nilai ini sedikit lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara parsial, variabel persentase balita stunting tidak berpengaruh signifikan pada tingkat signifikansi 5%, namun mendekati signifikan (marginal significance) tapi tetap tidak signifikan pengaruh yang diberikan oleh variasi dana desa terhadap balita stunting di NTB. Selain itu, koefisien bernilai positif (0,6716) menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase balita stunting, maka dana desa cenderung meningkat, meskipun pengaruh ini relatif lemah secara statistik.

b. Uji F (Simultan)

Nilai F hitung sebesar 3,93 dengan probabilitas (Prob > F) sebesar 0,0519. Nilai ini sedikit lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Oleh karena itu secara simultan, model regresi tidak signifikan pada tingkat 5%, namun mendekati signifikan. Jika menggunakan $\alpha = 10\%$, maka model dapat dikatakan signifikan secara simultan. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki indikasi hubungan, namun belum cukup kuat secara statistik pada tingkat kepercayaan 95%.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 sebesar 0,0596 atau 5,96%. Artinya variabel dana desa persentase hanya mampu menjelaskan sebesar 5,96% variabel balita stunting, sedangkan 94,04% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nilai ini menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen masih tergolong rendah.

6. Dana Desa Terhadap PDRB

Gambar 10. Hasil Output Olah Data Software STATA : Analisis Regresi Dana Desa Terhadap PDRB

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	64
Model	1295.58363	1	1295.58363	F(1, 62)	=	3.91
Residual	20544.4164	62	331.361554	Prob > F	=	0.0525
				R-squared	=	0.0593
				Adj R-squared	=	0.0441
Total	21840	63	346.666667	Root MSE	=	18.203

danadesa	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]
pdrbadhb	.0000838	.0000424	1.98	0.052	-9.16e-07 .0001684
_cons	28.89258	2.916484	9.91	0.000	23.06261 34.72255

Sumber : Data Sekunder diolah

a. Uji t (Parsial)

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel PDRB ADHB memiliki nilai t hitung sebesar 1,98 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,052. Nilai ini sedikit lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara parsial, variabel PDRB ADHB berpengaruh signifikan pada tingkat signifikansi 5%, namun mendekati signifikan (*marginal significance*). Apabila menggunakan tingkat signifikansi yang lebih longgar ($\alpha = 10\%$), maka Variabel dana desa dapat dianggap berpengaruh signifikan terhadap PDRB ADHB. Koefisien regresi bernilai positif (0,0000838) menunjukkan bahwa Peningkatan dana desa cenderung diikuti dengan peningkatan PDRB ADHB, meskipun pengaruhnya relatif kecil dan belum kuat secara statistik.

b. Uji F (Simultan)

Nilai F hitung sebesar 3,91 dengan probabilitas ($\text{Prob} > F$) sebesar 0,0525. Nilai ini sedikit lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Oleh karena itu secara simultan, model regresi signifikan pada tingkat 5%, namun mendekati signifikan. Jika menggunakan $\alpha = 10\%$, maka model dapat dikatakan signifikan secara simultan. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki indikasi hubungan antara variabel, tetapi belum cukup kuat secara statistik pada tingkat kepercayaan 95%.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 sebesar 0,0593 atau 5,93%. Artinya variabel dana desa hanya mampu menjelaskan sebesar 5,93% variabel PDRB ADHB, sedangkan 94,07% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nilai ini menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variasi dana desa masih tergolong rendah.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Desa terhadap berbagai indikator Pembangunan daerah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu variable Tingkat kemiskinan, pendapatan perkapita, gini rasio, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), persentase balita stunting, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan hasil penelitian serta dikaitkan dengan teori pembangunan ekonomi, konsep desentralisasi fiskal, dan kebijakan Dana Desa di Indonesia, diuraikan ruang bahasan (*discussion*) sebagai berikut :

1. Pengaruh Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel Dana Desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Temuan ini menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih

tinggi cenderung memperoleh alokasi Dana Desa yang lebih besar dibandingkan daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Secara teoritis, hasil tersebut sejalan dengan konsep desentralisasi fiskal yang menempatkan Dana Desa sebagai instrumen pengurangan kemiskinan. Dalam perspektif kebijakan publik, pemerintah pusat menggunakan indikator kemiskinan sebagai salah satu dasar utama dalam penentuan formula alokasi Dana Desa.

Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kemiskinan suatu wilayah, maka semakin besar pula peluang wilayah tersebut memperoleh alokasi anggaran dari dana desa yang lebih besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa Dana Desa telah diarahkan untuk menjadi instrumen afirmatif dalam mengurangi kemiskinan di daerah dalam hal ini Provinsi NTB. Pemerintah berupaya mendorong pembangunan desa melalui distribusi anggaran yang lebih berpihak kepada daerah tertinggal dan miskin. Pendekatan tersebut sesuai tujuan utama Undang-Undang Desa yang menekankan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat desa.

Di Provinsi NTB sendiri, tingkat kemiskinan desa masih menjadi persoalan utama pembangunan daerah. Kabupaten seperti Lombok Utara, Lombok Timur, dan Bima masih memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi dibandingkan daerah lainnya. Oleh sebab itu, besarnya alokasi Dana Desa yang diterima daerah tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan mengurangi kemiskinan.

Meskipun demikian, nilai koefisien determinasi (R^2) hanya sebesar 16,01 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa dana desa bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan. Masih terdapat faktor lain seperti jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis, dan jumlah desa yang turut memengaruhi. Dengan demikian, model penelitian masih memiliki keterbatasan dalam menjelaskan keseluruhan variasi Dana Desa.

Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa Dana Desa memiliki orientasi redistributif terhadap wilayah miskin. Dana Desa tidak hanya diposisikan sebagai sumber pembiayaan pembangunan fisik desa, tetapi juga sebagai instrumen fiskal yang diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, bantuan sosial, serta penguatan ekonomi lokal.

2. Pengaruh Dana Desa terhadap Pendapatan Per Kapita Per Bulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Dana Desa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan per kapita per bulan. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas sebesar 0,889 yang jauh berada di atas tingkat signifikansi 5 persen. Dengan demikian,

perubahan variasi Dana Desa tidak terbukti memengaruhi variasi pendapatan masyarakat pada model penelitian yang digunakan. Secara substantif, hasil ini menunjukkan bahwa variasi Dana Desa bukan merupakan indikator utama dalam formula penentuan pendapatan per kapita masyarakat di NTB . Pemerintah lebih menekankan variabel seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan kondisi geografis dalam distribusi Dana Desa. Oleh sebab itu, meskipun pendapatan masyarakat berubah, perubahan tersebut tidak secara langsung memengaruhi besaran Dana Desa yang diterima daerah.

Hasil penelitian ini dapat dipahami karena Dana Desa pada dasarnya merupakan instrumen pemerataan pembangunan, bukan instrumen yang secara langsung mempertimbangkan tingkat pendapatan masyarakat. Dalam konteks kebijakan fiskal, pemerintah lebih berorientasi pada kebutuhan dasar masyarakat desa dan kondisi keterbelakangan wilayah dibandingkan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat.

Di sisi lain, rendahnya pengaruh dana desa terhadap pendapatan per kapita juga menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat desa belum sepenuhnya mampu mencerminkan perubahan distribusi anggaran desa. Hal ini dimungkinkan karena pendapatan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti kesempatan kerja, investasi daerah, sektor pertanian, perdagangan, dan aktivitas ekonomi lokal.

Selain itu, nilai koefisien determinasi yang sangat kecil yaitu sebesar 0,03 persen menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang sangat rendah dalam menjelaskan hubungan antara Dana Desa dan pendapatan per kapita. Hampir seluruh variasi Dana Desa dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. Temuan ini sekaligus memperlihatkan bahwa keberhasilan Dana Desa tidak dapat diukur hanya melalui peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka pendek. Dampak Dana Desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kemungkinan membutuhkan waktu yang lebih panjang karena pembangunan desa bersifat bertahap dan berkelanjutan.

3. Pengaruh Dana Desa terhadap Gini Rasio

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap gini rasio. Nilai koefisien regresi sebesar -194,3358 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002 menunjukkan adanya hubungan berlawanan arah antara Dana Desa dan tingkat ketimpangan pendapatan. Secara teoritis, hasil ini mengindikasikan bahwa daerah dengan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi justru cenderung memperoleh alokasi Dana

Desa yang lebih rendah. Namun demikian, interpretasi hasil ini perlu dilakukan secara hati-hati karena gini rasio bukan indikator utama dalam formula distribusi Dana Desa.

Dalam praktik kebijakan fiskal di Indonesia, Dana Desa lebih banyak mempertimbangkan tingkat kemiskinan daripada tingkat ketimpangan pendapatan. Oleh sebab itu, hubungan negatif yang muncul dalam penelitian ini dapat disebabkan oleh adanya pengaruh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa Dana Desa belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan ketimpangan pendapatan antarwilayah. Meskipun Dana Desa diarahkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan desa, tetapi ketimpangan ekonomi masyarakat masih dipengaruhi oleh banyak faktor seperti akses pendidikan, penguasaan aset, kesempatan kerja, dan struktur ekonomi daerah.

Di Provinsi NTB, ketimpangan pembangunan antarwilayah masih menjadi tantangan pembangunan daerah. Wilayah dengan sektor ekonomi yang berkembang lebih cepat cenderung memiliki tingkat pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dibandingkan wilayah yang masih bergantung pada sektor primer seperti pertanian tradisional. Nilai koefisien determinasi sebesar 15,01 persen menunjukkan bahwa model penelitian masih memiliki keterbatasan dalam menjelaskan hubungan antara Dana Desa dan gini rasio. Sebagian besar gini rasio dipengaruhi oleh faktor lain yang belum dimasukkan dalam model penelitian.

Meskipun demikian, penelitian ini memberikan gambaran bahwa Dana Desa memiliki potensi untuk mendukung pemerataan pembangunan apabila penggunaannya diarahkan secara lebih produktif dan tepat sasaran. Penguatan program pemberdayaan masyarakat, pengembangan UMKM desa, serta pembangunan infrastruktur ekonomi desa dapat menjadi strategi penting dalam mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat desa.

4. Pengaruh Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel IPM. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas sebesar 0,275 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 5 persen. Dengan demikian, perubahan dana desa tidak terbukti memengaruhi besaran IPM dalam model penelitian. Secara konseptual, hasil ini dapat dipahami karena dana desa bukan merupakan indikator utama dalam menentukan peningkatan IPM. Pemerintah lebih menitikberatkan pada indikator kemiskinan, jumlah penduduk, dan karakteristik geografis wilayah dalam menentukan besaran Dana Desa.

IPM merupakan indikator komposit yang mencerminkan kualitas hidup berdasarkan tiga dimensi utama yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Perubahan IPM umumnya memerlukan waktu yang relatif panjang karena berkaitan dengan perubahan kualitas sumber daya manusia secara struktural. Dengan demikian, pengaruh Dana Desa terhadap peningkatan IPM kemungkinan tidak dapat terlihat secara langsung dalam jangka pendek. Program pembangunan desa yang didanai Dana Desa lebih banyak diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan publik desa.

Selain itu, rendahnya pengaruh dana desa terhadap IPM juga menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia di NTB masih dipengaruhi oleh faktor lain seperti kualitas pendidikan, fasilitas kesehatan, akses sanitasi, dan kemampuan ekonomi masyarakat. Nilai koefisien determinasi sebesar 1,92 persen menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang rendah dalam menjelaskan hubungan antara dana desa dan IPM. Artinya, hampir seluruh variabel IPM dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Meskipun tidak signifikan, Dana Desa tetap mendukung peningkatan IPM apabila penggunaannya diarahkan pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan pembangunan manusia. Misalnya melalui pembangunan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan desa, penanganan stunting, penyediaan air bersih, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

5. Pengaruh Dana Desa terhadap Persentase Balita Stunting

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dana desa memiliki hubungan positif terhadap persentase balita stunting, namun pengaruh tersebut tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen. Nilai probabilitas sebesar 0,052 menunjukkan bahwa hubungan tersebut hanya bersifat marginal. Temuan ini menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat stunting yang lebih tinggi cenderung memperoleh Dana Desa yang lebih besar. Secara kebijakan, kondisi ini dapat dipahami karena pemerintah menjadikan penanganan stunting sebagai salah satu prioritas penggunaan Dana Desa dalam beberapa tahun terakhir.

Melalui berbagai regulasi kementerian terkait, pemerintah mendorong desa untuk mengalokasikan Dana Desa pada program penurunan stunting seperti pemberian makanan tambahan, peningkatan layanan posyandu, penyediaan sanitasi, dan edukasi kesehatan masyarakat. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengaruh Dana Desa terhadap stunting belum terlalu kuat. Hal ini dimungkinkan karena stunting merupakan

persoalan multidimensional yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga pendidikan ibu, pola asuh anak, sanitasi lingkungan, akses air bersih, dan layanan kesehatan.

Selain itu, arah hubungan dalam model penelitian perlu ditinjau kembali karena secara konseptual Dana Desa seharusnya diposisikan sebagai faktor yang mempengaruhi penurunan stunting, bukan sebaliknya. Oleh sebab itu, penelitian berikutnya perlu mempertimbangkan penggunaan model yang lebih tepat agar hubungan kausalitas antarvariabel dapat dijelaskan secara lebih akurat. Nilai koefisien determinasi sebesar 5,96 persen menunjukkan bahwa model penelitian masih memiliki kemampuan yang rendah dalam menjelaskan variabel stunting. Sebagian besar variabel yang mempengaruhi stunting dipengaruhi oleh faktor lain yang belum dimasukkan dalam model penelitian. Meskipun demikian, hasil penelitian ini tetap menunjukkan bahwa pemerintah telah mulai mengintegrasikan kebijakan Dana Desa dengan program pembangunan kesehatan masyarakat desa. Dengan pengelolaan yang lebih efektif dan tepat sasaran, Dana Desa berpotensi menjadi instrumen penting dalam menurunkan angka stunting di Provinsi NTB.

6. Pengaruh Dana Desa terhadap PDRB

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Dana Desa memiliki hubungan positif terhadap PDRB, namun pengaruhnya signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen. Nilai probabilitas sebesar 0,052 menunjukkan bahwa hubungan tersebut masih berada pada kategori marginal. Secara teoritis, hasil ini mengindikasikan bahwa daerah dengan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki Dana Desa yang lebih besar. Hal tersebut dapat dipahami karena daerah dengan aktivitas ekonomi yang berkembang biasanya memiliki kapasitas pembangunan desa yang lebih baik.

Namun demikian, rendahnya tingkat signifikansi menunjukkan bahwa Dana Desa telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara bertahap namun belum terlalu kuat. Kondisi ini dapat terjadi karena penggunaan Dana Desa masih lebih banyak difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar dan program sosial dibandingkan penguatan sektor ekonomi produktif. Di Provinsi NTB, struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor pertanian, perdagangan, dan jasa. Dampak Dana Desa terhadap pertumbuhan ekonomi kemungkinan membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk dapat terlihat secara nyata.

Nilai koefisien determinasi sebesar 5,93 persen menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan yang rendah dalam menjelaskan hubungan antara Dana Desa dan PDRB. Artinya, sebagian besar variabel PDRB dipengaruhi oleh faktor lain di luar model

penelitian. Meskipun demikian, Dana Desa tetap mendukung pertumbuhan ekonomi desa apabila diarahkan pada program-program produktif seperti pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), penguatan UMKM, pembangunan pasar desa, pengembangan sektor pariwisata desa, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data panel mengenai pengaruh Dana Desa terhadap indikator pembangunan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2018–2025, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Dana Desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi cenderung memperoleh alokasi Dana Desa yang lebih besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Dana Desa telah diarahkan sebagai instrumen afirmatif pemerintah dalam mendukung pemerataan pembangunan dan pengurangan kemiskinan di wilayah desa.
2. Variabel Dana Desa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan per kapita per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan tingkat pendapatan masyarakat belum menjadi faktor utama dalam mekanisme distribusi Dana Desa. Penentuan Dana Desa masih lebih dipengaruhi oleh indikator lain seperti tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, luas wilayah, dan kondisi geografis daerah.
3. Variabel dana desa memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap gini rasio. Hasil ini menunjukkan adanya hubungan berlawanan arah antara dana desa dan tingkat ketimpangan pendapatan. Karena gini rasio bukan indikator utama dalam formula distribusi Dana Desa, maka hubungan ini perlu diinterpretasikan secara hati-hati dan kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.
4. Variabel Dana Desa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia belum secara langsung berkaitan dengan mekanisme alokasi Dana Desa. Dampak Dana Desa terhadap pembangunan manusia diperkirakan membutuhkan waktu yang lebih

- panjang karena berkaitan dengan perubahan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat secara bertahap.
5. Variabel dana desa menunjukkan hubungan positif terhadap persentase balita stunting, namun pengaruhnya tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah mulai mengarahkan Dana Desa untuk mendukung program penurunan stunting, meskipun dampaknya masih belum optimal dan memerlukan penguatan kebijakan serta integrasi program kesehatan masyarakat desa.
 6. Variabel dana desa menunjukkan pengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi pengaruhnya signifikan walau masih relatif lemah. Kondisi ini menunjukkan bahwa Dana Desa belum sepenuhnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan namun secara bertahap sudah mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Penggunaan Dana Desa masih lebih banyak difokuskan pada pembangunan dasar dan program sosial dibandingkan penguatan sektor ekonomi produktif masyarakat desa.
 7. Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Desa memiliki peran penting sebagai instrumen pemerataan pembangunan dan pengurangan kemiskinan di Provinsi NTB. Namun demikian, efektivitas Dana Desa terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia, penurunan stunting, dan pertumbuhan ekonomi daerah masih relatif terbatas. Oleh sebab itu, optimalisasi pengelolaan Dana Desa, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa, serta penguatan program pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan Dana Desa di masa mendatang.
 8. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa keberhasilan Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang disalurkan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan pembangunan, kapasitas aparatur desa, ketepatan sasaran program, serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam mengelola pembangunan wilayah secara berkelanjutan.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan, pemerataan pembangunan, kualitas pembangunan manusia, stunting, dan

pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi NTB, maka rekomendasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memfokuskan Dana Desa pada pengentasan kemiskinan dan stunting dengan jalan pemerintah daerah memastikan bahwa Dana Desa diarahkan pada program-program prioritas yang berkaitan langsung dengan pengurangan kemiskinan, pemerataan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa dengan cara Pemerintah Provinsi NTB memperkuat koordinasi pembangunan lintas level pemerintahan agar program pembangunan desa tidak berjalan secara parsial. Sinkronisasi antara RPJMD provinsi, program kabupaten, dan prioritas penggunaan Dana Desa sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pembangunan daerah secara menyeluruh.
3. Mendorong pengembangan ekonomi desa berbasis potensi lokal dengan jalan Pemerintah daerah mendorong desa-desa di NTB untuk mengembangkan potensi unggulan lokal seperti pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Dana Desa dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur ekonomi desa, penguatan rantai distribusi produk lokal, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha desa.
4. Peningkatan kualitas pembangunan manusia disebabkan oleh pengaruh Dana Desa terhadap IPM masih belum signifikan, pemerintah daerah perlu memperkuat integrasi Dana Desa dengan program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan Masyarakat karena intervensi pembangunan manusia harus dilakukan secara berkelanjutan agar dampaknya dapat terlihat dalam jangka panjang.
5. Memperkuat tata kelola dan akuntabilitas Dana Desa dengan cara Pemerintah daerah NTB meningkatkan pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa melalui digitalisasi pelaporan, penguatan peran inspektorat, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa. Tata kelola yang baik akan meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Desa dan meminimalkan risiko penyimpangan anggaran.
6. Rekomendasi strategis jangka panjang dengan jalan Dana Desa diposisikan tidak hanya sebagai instrumen transfer fiskal rutin, tetapi sebagai instrumen transformasi ekonomi desa. Secara kongkrit pemerintah daerah membangun sistem kebijakan yang mampu meningkatkan kemandirian ekonomi desa, mengurangi ketimpangan antarwilayah, mempercepat pembangunan manusia, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Kontribusi Penelitian

Efektivitas Dana Desa sebagai instrumen desentralisasi fiskal telah mendorong pemerataan pembangunan, pengurangan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi NTB melalui pendekatan kuantitatif berbasis data panel dari tahun 2018-2025 yang masih relatif terbatas dilakukan pada konteks daerah kepulauan dan wilayah timur Indonesia. Secara konseptual penelitian ini memperkaya dan memperluas literatur mengenai hubungan antara transfer fiskal dan pembangunan daerah dengan menunjukkan bahwa Dana Desa belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini memberikan masukan strategis bagi pemerintah Provinsi NTB dalam memperbaiki arah kebijakan Dana Desa agar tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran dan pembangunan fisik, tetapi lebih diarahkan pada pembangunan ekonomi produktif, penguatan kualitas sumber daya manusia, penurunan stunting, dan pengurangan ketimpangan pembangunan desa secara berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan, diantaranya belum membahas mengenai sisi kualitatif yang bisa memberikan informasi konteks sesungguhnya di lapangan. Data kuantitatif yang tersedia secara sekunder masih sangat terbatas hanya digunakan data tahun 2018 sampai tahun 2025 sehingga rentang data kurang dari sepuluh tahun. Cakupan wilayah dari data yang tersedia, hanya sampai di lingkup kabupaten dan belum terperinci hingga wilayah desa sehingga perbedaan kondisi antardesa belum tergambarkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data sekunder sehingga hasil analisis lebih menekankan pada hubungan statistik antarvariabel dan belum mampu menggambarkan kondisi empiris secara mendalam di tingkat desa. Dengan demikian, penelitian ini belum sepenuhnya menangkap aspek sosial, budaya, kelembagaan, maupun dinamika implementasi Dana Desa di lapangan.

Data yang digunakan dalam penelitian masih terbatas pada level kabupaten/kota di Provinsi NTB sehingga belum mampu menggambarkan variasi kondisi antar desa secara lebih rinci. Padahal, setiap desa memiliki karakteristik ekonomi, sosial, dan geografis yang berbeda sehingga kemungkinan menghasilkan dampak Dana Desa yang berbeda pula.

Rentang waktu penelitian hanya mencakup periode tahun 2018–2025 sehingga belum cukup panjang untuk melihat dampak jangka panjang Dana Desa terhadap pembangunan

manusia, pengurangan ketimpangan, maupun pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih komprehensif.

Variabel penelitian yang digunakan masih relatif terbatas dan belum sepenuhnya mampu menjelaskan keseluruhan variasi Dana Desa maupun indikator pembangunan daerah. Hal ini terlihat dari rendahnya nilai koefisien determinasi (R^2) pada beberapa model regresi. Dengan demikian, masih terdapat faktor-faktor lain di luar model penelitian yang kemungkinan memiliki pengaruh terhadap pembangunan desa, seperti kualitas tata kelola pemerintahan desa, partisipasi masyarakat, kualitas sumber daya manusia, investasi daerah, serta kondisi infrastruktur wilayah.

Penelitian ini belum memasukkan aspek efektivitas penggunaan Dana Desa berdasarkan jenis belanja atau sektor prioritas pembangunan desa. Padahal, perbedaan pola penggunaan Dana Desa dapat menghasilkan dampak pembangunan yang berbeda antarwilayah.

Model analisis yang digunakan masih memiliki keterbatasan dalam menjelaskan hubungan kausalitas antarvariabel. Pada beberapa model ditemukan kemungkinan adanya hubungan dua arah (*reverse causality*), seperti hubungan antara Dana Desa dan stunting maupun Dana Desa dan tingkat kemiskinan, sehingga hasil penelitian perlu diinterpretasikan secara hati-hati.

Keterbatasan akses terhadap data terbaru dan data mikro desa menyebabkan penelitian ini belum dapat mengukur dampak Dana Desa secara lebih detail terhadap kesejahteraan rumah tangga masyarakat desa di Provinsi NTB.

Saran Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian berikutnya disarankan menggunakan cakupan data yang lebih luas hingga tingkat desa agar mampu menggambarkan kondisi pembangunan secara lebih rinci dan spesifik. Penggunaan data tingkat desa diharapkan dapat memberikan hasil analisis yang lebih akurat mengenai pengaruh Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Penelitian selanjutnya perlu menggunakan rentang waktu yang lebih panjang agar dapat melihat dampak jangka panjang Dana Desa terhadap pembangunan ekonomi,

- pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pembangunan manusia, dan pemerataan pembangunan antarwilayah secara lebih komprehensif.
3. Disarankan menambahkan variabel lain yang relevan dalam model penelitian yang dalam penelitian ini tidak dilakukan, seperti PDRB Atas Dasar Harga Konstan, jumlah penduduk, tingkat pengangguran, kualitas infrastruktur desa, tingkat pendidikan masyarakat, kualitas tata kelola pemerintahan desa, partisipasi masyarakat, investasi daerah, serta perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penambahan variabel tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi pembangunan daerah.
 4. Perlu menggunakan pendekatan *mixed methods* dalam penelitian selanjutnya atau kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kualitatif dapat membantu menggambarkan kondisi nyata implementasi Dana Desa di lapangan, termasuk kendala, efektivitas program, dan persepsi masyarakat terhadap pembangunan desa.
 5. Untuk memperoleh hasil yang lebih kuat secara metodologis, penelitian berikutnya dapat menggunakan model analisis yang lebih komprehensif seperti *Fixed Effect Model (FEM)*, *Random Effect Model (REM)*, *Difference in Difference (DID)* atau pendekatan ekonometrika lainnya yang mampu menjelaskan hubungan kausalitas antarvariabel atau menggunakan lebih dari satu variabel independen secara lebih baik.
 6. Perlu mengkaji efektivitas penggunaan Dana Desa untuk dimasukkan dalam penelitian berikutnya untuk melihat sektor prioritas tertentu, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanganan stunting, ketahanan pangan, maupun pengembangan pariwisata desa lebih produktif untuk dimasukkan dalam penelitian lanjutan.
 7. Penelitian selanjutnya perlu membandingkan efektivitas Dana Desa antarprovinsi atau antarwilayah untuk melihat perbedaan dampak kebijakan berdasarkan karakteristik sosial ekonomi dan geografis masing-masing daerah.
 8. Mengingat pentingnya pembangunan manusia dalam pembangunan desa, penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih mendalami pengaruh Dana Desa terhadap indikator pendidikan, kesehatan, kualitas tenaga kerja, dan produktivitas masyarakat desa secara lebih spesifik.

9. Penelitian di masa mendatang juga perlu mempertimbangkan faktor eksternal seperti pandemi, inflasi, perubahan kebijakan fiskal nasional, serta kondisi ekonomi makro yang dapat memengaruhi efektivitas Dana Desa dalam mendukung pembangunan daerah.
10. Selain itu, penelitian berikutnya diharapkan dapat mengkaji hubungan antara kualitas tata kelola pemerintahan desa dan efektivitas Dana Desa, karena keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, transparansi, akuntabilitas, dan kapasitas aparatur desa dalam mengelola program pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Ngurah Gede, W., & Iskandar, D. A. (2023). Dampak Dana Desa terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Regional di Indonesia. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 7(2), 138–150. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2023.7.2.138-150>
- Badan Pusat Statistik. (2025, 30 Januari). Garis Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Kabupaten/Kota (Rp/Kapita/Bulan), 2025. diakses dari <https://ntb.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTA1IzI=/garis-kemiskinan-provinsi-nusa-tenggara-barat-menurut-kabupaten-kota-rp-kapita-bulan-.html>
- Badan Pusat Statistik. (2025, 30 Januari). Persentase Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2025. diakses dari <https://ntb.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDYwIzI=/persentase-penduduk-miskin-provinsi-nusa-tenggara-barat-menurut-kabupaten-kota.html>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2022). Laporan Pemantauan Transfer ke Daerah Kanwil DJPb Provinsi NTB Tahun 2022. Mataram: Kanwil DJPb Provinsi NTB.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2023). Laporan Pemantauan Transfer ke Daerah Kanwil DJPb Provinsi NTB Tahun 2023. Mataram: Kanwil DJPb Provinsi NTB.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2024). Laporan Pemantauan Transfer ke Daerah Kanwil DJPb Provinsi NTB Tahun 2024. Mataram: Kanwil DJPb Provinsi NTB.
- Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara <https://spanint.kemenkeu.go.id/tkd/>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025

Rifa'at, M., & Farid, A. (t.t.). Pemerataan Pembangunan Sosial Ekonomi antara Indonesia Timur-Barat sebagai Upaya Mempererat Kebhinekaan. *Instructional Development Journal (IDJ)*. Diambil <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/IDJ>

Republik Indonesia (2014) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Republik Indonesia (2022) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development, 11th Edition*. Pearson Education